



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YOPI EKO JATI WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 234560

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.420.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m<sup>2</sup>/136 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah Seluas 350 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m<sup>2</sup>/294 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 3.550.000.000
4. Tanah Seluas 1200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
5. Tanah Seluas 750 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 880 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 322.000.000**

1. MOTOR, HONDA PLETHUK SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, VESPA P150X SPM/SCOOTER Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT/F70 MPNP/JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 229.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 72.475.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	374.446.401
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.188.921.401
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.188.921.401

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.